

Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional



**Diklat Dasar Perencanaan Staf Bappenas Angkatan VI
LPEM FEUI-Jakarta, 2 Maret 2015**



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI

LEMBAGA PENELITIAN EKONOMI
DAN MASYARAKAT
Kampus UI Salemba
Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430
Tel. (+62-21) 5143177
Fax. (+62-21) 51094110
http://www.fe.ui.ac.id

24 Februari 2015

Nomor : 4033/H2.F6.D2.LPM/PDP.SKD/2014
Perihal : Permohonan Memberikan Kuliah

Kepada : Bapak Dr. Dadang Solihin
Bappenas
Jl. Taman Suropati No.2
Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Diklat LPEM-FEUI akan menyelenggarakan
"Diklat Dasar-dasar Perencanaan Bagi Staf Bappenas Angkatan VI yang
berlangsung dari tanggal 2 s/d 13 Maret 2015

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk
membantu kami memberikan kuliah dengan topik dan jadwal sebagai
berikut :

Topik : Pemahaman Peran Bappenas Dalam Perencanaan
Pembangunan Nasional
Hari/Tanggal : **Senin, 2 Maret 2015**
Waktu : 09.45 - 11.15 (1 Sesi)
Tempat : Diklat LPEM-FEUI,
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta

Kami sangat berharap Bapak/Ibu berkenan membantu kami, dan apabila
ada bahan kuliah yang akan dibagikan kepada peserta diklat, mohon dapat
dikirim melalui e-mail sri.harwati@lpe-feui.org untuk kami
perbanyak, untuk konfirmasi dapat menghubungi Sdr. Sri telp. 3143177
Ext. 623

Atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Kepala LPEM-FEUI
Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Untung Afandi, S.E., MM
NUP.: 060 603 659



Dadang Solihin



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

- Siklus Manajemen Pembangunan
- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU 25/2004
- RPJMN 2015-2019
- Peran Strategis Bappenas



Siklus Manajemen Pembangunan





Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU 25/2004



Apa itu SPPN

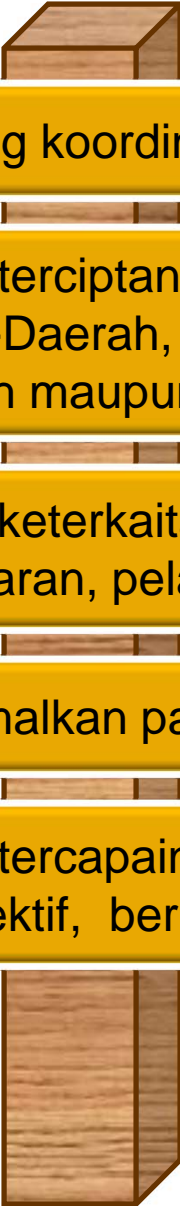


SPPN adalah

- ❑ Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
- ❑ Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
- ❑ Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.



Tujuan SPPN

- 
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Proses Perencanaan



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Ruang Lingkup Perencanaan

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

Persyaratan Dokumen Perencanaan: **SMART**

- **SPECIFIC**-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
- **MEASUREABLE**-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
- **ACHIEVABLE**-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
- **RELEVANT** (information needs of the people who will use the data)
- **TIMELY**-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.



Perencanaan yang Ideal

- **Prinsip partisipatif:** masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
- **Prinsip kesinambungan:** perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
- **Prinsip holistik:** masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
- Mengandung sistem yang dapat berkembang (*a learning and adaptive system*).
- Terbuka dan demokratis (*a pluralistic social setting*).

Fungsi/Manfaat Perencanaan

- Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas





RPJMN 2015-2019

Sumber: Perpres 5/2015

Dasar Hukum

Penyusunan RPJMN 2015-2019

1. UU 25/2004 tentang SPPN:

Pasal 19 ayat 1:

RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik.

2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005 – 2025

Arah pembangunan untuk RPJM ke-3 (2015-2019):

“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”.



Dokumen RPJMN 2015-2019



BUKU I: AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Pendahuluan
2. Kondisi Umum
3. Lingkungan Strategis
4. Kerangka Ekonomi Makro
5. Kebijakan Pembangunan Nasional
6. Agenda Pembangunan Nasional
7. Kaidah Pelaksanaan

BUKU II: AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG

1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang
2. Pembangunan SOSBUD dan Kehidupan Beragama
3. Ekonomi
4. Bidang IPTEK
5. Bidang Politik
6. Bidang HANKAM
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
9. Bidang Penyediaan SARPRAS
10. Bidang Pengelolaan SDA dan LH

BUKU III: AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH

1. Wilayah Nasional
2. Wilayah Papua
3. Wilayah Maluku
4. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
5. Wilayah Pulau Sulawesi
6. Wilayah Pulau Kalimantan
7. Wilayah Pulau Jawa -Bali
8. Wilayah Pulau Sumatera

Struktur RPJMN 2015-2019

VISI:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

7 MISI

NAWACITA
9 Agenda Prioritas

TRISAKTI

Berdaulat dalam
Bidang Politik

- 12 Program Aksi
- 115 Prioritas Utama

Berdikari dalam
Bidang Ekonomi

- 16 Program Aksi

Berkepribadian dalam
Bidang Kebudayaan

- 3 Program Aksi

Misi

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan **kualitas hidup manusia Indonesia** yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

NAWACITA - 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup **Manusia dan Masyarakat** Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Trisakti

I. Berdaulat dalam Bidang Politik

1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global.
2. Memperkuat sistem pertahanan negara.
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah.
8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.
9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan.
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.
12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Trisakti

II. Berdikari dalam Bidang Ekonomi

1. Mendedikasikan diri untuk pembangunan kualitas SDM.
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh.
6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional.
7. Penguatan investasi domestik.
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.
9. Membangun infrastruktur.
10. Membangun ekonomi maritim.

Trisakti

11. Penguatan sektor kehutanan.
12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan.
14. Membangun karakter dan potensi wisata.
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.
16. Pengembangan industri manufaktur.

III. Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan

1. **Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.**
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.
3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga.

Keterkaitan Visi-Misi, Nawacita, dan Trisakti

VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

7 MISI

Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.	Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	Kualitas hidup manusia Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera	Bangsa berdaya saing	Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional	Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.
---	--	--	--	----------------------	--	--

NAWACITA – 9 Agenda Prioritas

Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan	Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	Akan mening-katkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Akan melakukan revolusi karakter bangsa	Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
--	---	---	---	--	---	--	---	---

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 Program Aksi-115 Prioritas Utama)

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 Program Aksi)

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 Program Aksi)

<ol style="list-style-type: none"> Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) Menguatkan sistem pertahanan negara (4) Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7) 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8) 	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6) Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5) 	<ol style="list-style-type: none"> Dedikasikan pembangunan kualitas SDM Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan Mendedikasikan program u/ membangun daulat energi berbasis kepentingan nas. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun pemberdayaan buruh Membangun sektor keuangan berbasis nasional Penguatan investasi domestik Membangun penguatan kapasitas fiskal negara Membangun infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun ekonomi maritim Penguatan sektor kehutanan Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan Membangun perimbangan pembangunan kawasan Membangun karakter dan potensi wisata Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional Pengembangan industri manufaktur 	<ol style="list-style-type: none"> Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa 	<ol style="list-style-type: none"> Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 	<ol style="list-style-type: none"> Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga
---	--	---	--	---	--	--	--	--

Strategi Pembangunan

NORMA PEMBANGUNAN

- 1) Membangun untuk **manusia dan masyarakat**;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah:

- (1) Desa,
- (2) Pinggiran,
- (3) Luar Jawa,
- (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

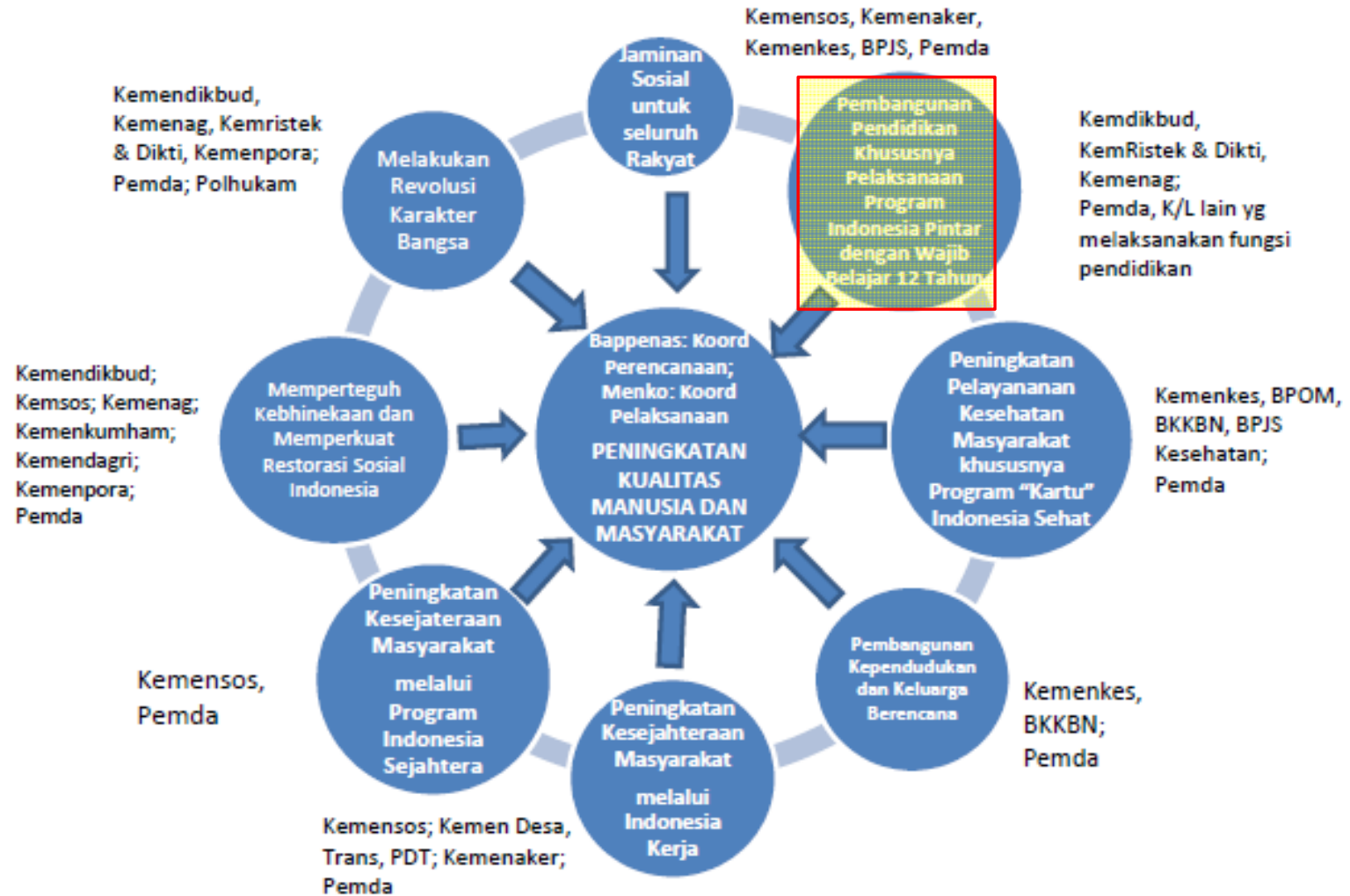
Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

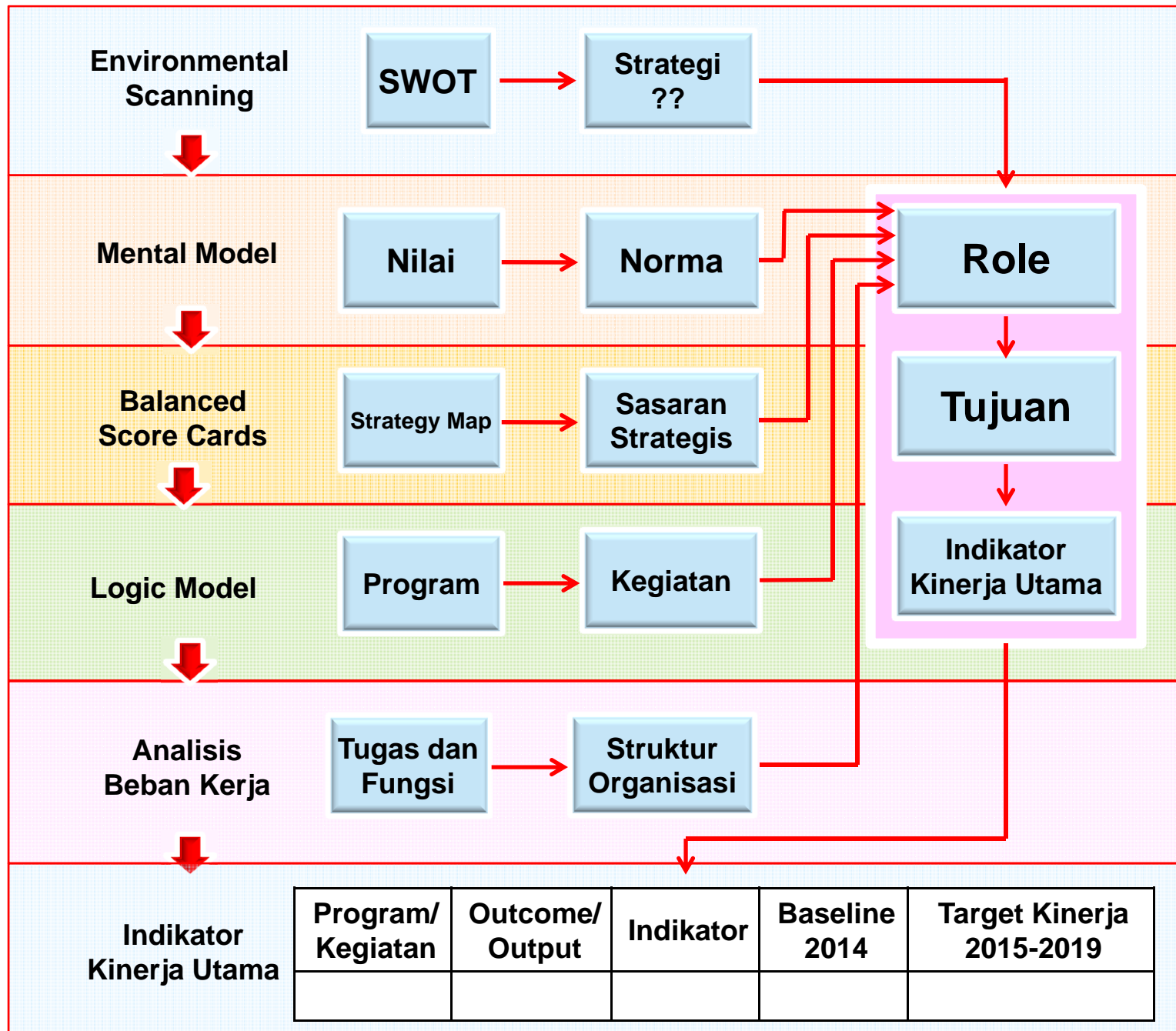
Pembangunan Manusia dan Masyarakat



Peran Strategis Bappenas

Merumuskan Peran Bappenas → Manajemen Kinerja

- Organisasi
- Tatalaksana
- Peraturan Per-UU-an
- SDM Aparatur
- Pengawasan
- Akuntabilitas
- Pelayanan Publik
- Mindset & Cultural Set Aparatur



Delapan Langkah Penyusunan Renstra Bappenas



Visi-Misi Bappenas

VISI :

Mewujudkan Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat menghasilkan Rencana Pembangunan Nasional yang berkualitas, kredibel, dan sinergis demi mencapai tujuan negara yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

MISI :

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional.
- Merumuskan, menetapkan, menyeleraskan rencana pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional (antar pusat dan daerah).
- Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L dengan strategi dan prioritas pembangunan nasional.
- Melakukan pengendalian pembangunan nasional.
- Meningkatkan kualitas SDM perencana pusat dan daerah.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Tujuan dan Peran Bappenas

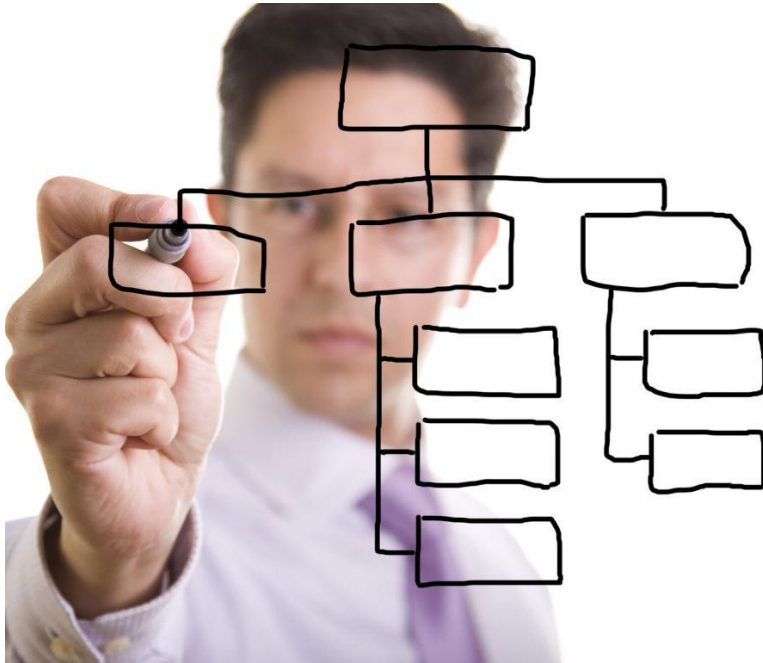
Tujuan Strategis

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional yang berkualitas
2. Terwujudnya Pengendalian Pembangunan nasional yang berkualitas;
3. Terlaksananya koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran kementerian PPN/Bappenas
4. Tercapainya kapasitas kelembagaan yang kuat.

Peran Strategis

1. Penyusunan kebijakan/pengambil keputusan,
2. Lembaga think-tank,
3. Sebagai koordinator dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dan
4. Sebagai administrator dalam menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas dan efektif.

Policy/Decision Maker



1. Penyusunan rencana pembangunan nasional,
2. Penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBN bersama Kementerian Keuangan,
3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan,
4. Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.

Think Tank

1. Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya,
2. Fasilitasi pembinaan perencanaan di pusat dan di daerah,
3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.



Koordinator



1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan,
2. Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.

Administrator

1. Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN),
2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan,
3. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi,
4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.





Terima Kasih